

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 29 MARET 2023

RINGKASAN BERITA HARI INI



Proyek Flyover Aloha Bikin Macet, Bupati Sidoarjo Mohon Maaf

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor, meminta maaf kepada masyarakat atas dampak kemacetan yang terjadi akibat pembangunan proyek Flyover Aloha. Bupati Muhdlor menyampaikan permohonan maaf melalui siaran pers yang diterima Kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (22/3/2023).

"Saya selaku kepala daerah sangat menyesal atas dampak kemacetan yang terjadi akibat pembangunan proyek Flyover Aloha. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo," ujar Bupati Muhdlor.

Bupati Sidoarjo Minta Maaf ke Pengguna Jalan Karena Proyek Flyover Aloha

SIDOARJO, 22 Maret 2023. Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor, meminta maaf kepada masyarakat atas dampak kemacetan yang terjadi akibat pembangunan proyek Flyover Aloha. Bupati Muhdlor menyampaikan permohonan maaf melalui siaran pers yang diterima Kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (22/3/2023).

"Saya selaku kepala daerah sangat menyesal atas dampak kemacetan yang terjadi akibat pembangunan proyek Flyover Aloha. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo," ujar Bupati Muhdlor.

Dukung Program Ketahanan Pangan, TP PKK Sidoarjo Minta Pemanfaatan Lahan Pekarangan Keluarga

SIDOARJO, 22 Maret 2023. Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan keluarga untuk mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gedangan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan keluarga sebagai sumber pangan yang berkelanjutan," ujar Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor.

LKPD Unaudited Tahun 2022 Diserahkan ke BPK Gus Muhdlor Berharap Sidoarjo Pertahankan WTP

SIDOARJO, 22 Maret 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor. Bupati Muhdlor berharap Sidoarjo dapat mempertahankan statusnya sebagai kota yang berprestasi.

"Kami berharap BPK dapat memberikan penilaian yang objektif dan transparan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kami," ujar Bupati Muhdlor.

Diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas dan Risalah Sekretariat DPRD Sidoarjo

LKPD Unaudited Tahun 2022 Diserahkan ke BPK, Bupati Berharap Sidoarjo Sabet WTP

Sidoarjo, Pojok Kiri - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor.

Bupati Muhdlor berharap Sidoarjo dapat mempertahankan statusnya sebagai kota yang berprestasi dan meraih penghargaan sebagai kota yang berprestasi.

"Kami berharap BPK dapat memberikan penilaian yang objektif dan transparan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kami," ujar Bupati Muhdlor.

"Kami berharap BPK dapat memberikan penilaian yang objektif dan transparan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kami," ujar Bupati Muhdlor.

Dukung Program Ketahanan...

Beberapa metode penanaman yang dapat dipraktikkan adalah *verti culture*, *wall garden*, serta *aquaphonic* seperti yang sudah dipraktikkan oleh Puskesmas Tulangan.

"Diharapkan masyarakat dapat membantu kegiatan ini dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah dan meningkatkan kemandirian pangan keluarga di wilayah Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

PEGUNGA JALAN TERGANGGU PROYEK FLYOVER ALOHA, BUPATI MOHON MAAF

Sidoarjo, Pojok Kiri - Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor, meminta maaf kepada pengguna jalan yang terganggu akibat pembangunan proyek Flyover Aloha.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna jalan yang terganggu akibat pembangunan proyek Flyover Aloha," ujar Bupati Muhdlor.

Tambah Layanan Adminduk Terintegrasi di Enam Instansi Kesehatan

KOTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sidoarjo menambah layanan Adminduk terintegrasi di enam instansi kesehatan.

"Layanan Adminduk terintegrasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan," ujar Kepala Dinas Disdukcapil Kota Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LKPD Unaudited Tahun 2022 Diserahkan ke BPK, Bupati Berharap Sidoarjo Sabet WTP

Sidoarjo, Pojok Kiri

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor SIP kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi di kantor BPK Perwakilan Jatim, Senin (27/3). Penyerahan LKPD tersebut serentak bersama 38 pemerintah daerah di Jawa Timur. Terkecuali Kota Madiun yang telah menyerahkannya dibulan Januari lalu. Dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa juga menyerahkan langsung LKPD Unaudited 2022 Provinsi Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo kembali sabet opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan demikian capain itu akan menjadi yang ke 10 kali berturut-turut diraih Pemkab Sidoarjo sejak LKPD tahun 2013 lalu. Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor bersyukur bila Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP nya. Menurutnya capain tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi



Pemerintahan (SAP).

"Ini bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,"ujarnya.

Menurut Gus Muhdlor capaian opini WTP penting dipertahankan. Pasaunya bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi. Untuk itu ia akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Kerja keras seluruh ASN Sidoarjo dimintanya dapat terus dipertahankan.

"Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola

secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan,"ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya, sehingga dapat menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited secara tepat waktu sesuai amanat undang-undang. Dijelaskannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek. Yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampirkan dengan laporan

keuangan perusahaan daerah (BUMD),"sampainya.

Selain itu lanjut Karyadi, dikatakannya bahwa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, LKPD juga dilampiri dengan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yang didalamnya termasuk realisasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Masih dikatakan Karyadi bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberi waktu 2 bulan untuk memeriksa kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD dan menyampaikannya kepada pihak legislatif dan kepala daerah. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SIDAK: Bupati Gus Muhdlor, Camat Gedangan Inneke dan Kabag Pengaduan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Budi Eksuki.



DIBONGKAR: Pembongkaran bangunan dalam Bundaran Aloha yang terkena proyek Flyover Aloha Gedangan.

Proyek Flyover Aloha Bikin Macet, Bupati Sidoarjo Mohon Maaf

SIDOARJO (BM) – Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan yang melewati jalan Aloha Gedangan karena adanya proyek Flyover Aloha. Namun, Gus Muhdlor memastikan proyek Flyover Aloha bakal tuntas pada April 2024 mendatang. Permintaan maaf itu sebelumnya juga sudah disampaikan bupati beberapa waktu yang lalu saat ia meninjau proyek strategis nasional yang bakal mengurai titik kemacetan di Sidoarjo utara tersebut. Ia juga menegaskan akan terus mengawal proyek Flyover Aloha hingga tuntas dan selesai

sesuai target yang ditetapkan.

"Saya minta maaf karena ada pengaturan arus lalu lintas akibat pembangunan proyek Flyover Aloha, mohon pengertian dan dukungannya masyarakat, insyaAllah proyek selesai tepat waktu yakni April tahun depan," ujar Gus Muhdlor, Senin (27/3).

Dalam pantauan Gus Muhdlor sejauh ini proyek berjalan sesuai dengan target. Para pekerja dilihatnya telah bekerja optimal sesuai dengan rencana. Pengaturan arus lalu lintas menurut alumni Fisip Unair Surabaya itu tidak bisa dihindarkan dan efeknya ada kemacetan.

"Sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah, kami memastikan petugas sudah bekerja keras mengatur arus lalu lintas di sekitar proyek Flyover Aloha," tegasnya.

Pembangunan proyek flyover Aloha menurut Gus Muhdlor harus dilakukan sebagai solusi mengatasi kemacetan yang terjadi menahun di jalur Sidoarjo – Surabaya di pintu masuk Bandara Internasional Juanda tersebut.

Proyek Flyover Aloha mulai dikerjakan pada Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada April 2024. Gus Muhdlor menegaskan pembangunan Flyover Aloha

nantinya setelah rampung keberadaan Flyover Aloha itu akan memperlancar arus lalu lintas dari Sidoarjo menuju Surabaya dan sebaliknya.

"Ben gak tuwek nang dalan (supaya tidak menjadi tua di jalan), Flyover Aloha harus dibangun untuk mengurai kemacetan yang sudah terjadi menahun di Aloha," sampainya.

Untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar proyek Flyover Aloha, pengaturan dilakukan. Bupati muda putra KH Agos, Ali Masyhuri pengasuh Pesantren Progressif Bumi Shalawat itu sudah memerintahkan jajaran

terkait seperti Dinas Perhubungan untuk turun mengatur kelancaran lalu lintas.

Ia juga memastikan selama proyek flyover Aloha berjalan petugas dari Dinas Perhubungan siap siaga mengatur arus lalu lintas di beberapa titik di ruas jalan Bundaran Aloha. Selain dari dishub, pengaturan lalu lintas juga dilakukan dari petugas kepolisian.

"Sekarang fokusnya mengatur pengaturan arus di lokasi proyek Flyover Aloha. Jajaran dari Dinas Perhubungan dan polisi sudah bekerja maksimal mengatur lalu lintas sekaligus untuk membantu kelancaran pengguna jalan," pungkasnya. (adf)

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
BeritaMetro

Bupati Sidoarjo Minta Maaf ke Pengguna Jalan Karena Proyek Flyover Aloha

Ben Nggak Tuwek Nang Dalan!

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat dan pengguna jalan yang melintasi Jalan Aloha, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Ini menyusul karena adanya proyek pembangunan Flyover Aloha yang pekerjaannya sedang dikebut itu.

Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini memastikan proyek Flyover Aloha bakal tuntas pada April 2024 mendatang. Permintaan maaf itu sebelumnya juga sudah disampaikan Bupati Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, saat meninjau proyek strategis nasional yang bakal mengurai titik kemacetan di Sidoarjo utara itu.

"Kami akan terus mengawal proyek Flyover Aloha hingga tuntas dan selesai sesuai target yang ditetapkan. Saya minta maaf, karena ada pengaturan arus lalu lintas dampak pembangunan proyek Flyover Aloha. Mohon pengertian dan dukungan masyarakat. Inshaallah proyek selesai tepat waktu yakni April

Tahun 2024 mendatang," ujar Gus Muhdlor kepada Memo X, Senin (27/03/2024).

Dalam pantauan Gus Muhdlor, sejauh ini proyek berjalan sesuai dengan target. Para pekerja terlihat telah bekerja optimal sesuai dengan rencana. Pengaturan arus lalu lintas menurut Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini tidak bisa dihindarkan dan efeknya adanya kemacetan.

"Sekali lagi, kami sampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami memastikan petugas sudah bekerja keras mengatur arus lalu lintas di sekitar proyek Flyover Aloha," imbuhnya.

Pembangunan proyek Flyover Aloha menurut Gus Muhdlor harus dilakukan sebagai solusi mengatasi kemacetan yang terjadi menahun di jalur Sidoarjo-Surabaya itu. Bahkan, di pintu masuk bandara Internasional Juanda itu.

"Kami pastikan proyek Flyover Aloha mulai dikerjakan pada Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada April 2024,"

tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Gus Muhdlor menilai pembangunan Flyover Aloha nanti setelah rampung keberadaan Flyover Aloha akan memperlancar arus lalu lintas dari Sidoarjo menuju Surabaya dan sebaliknya.

"Ben nggak tuwek nang dalan (biar tidak rua di jalan), Flyover Aloha harus dibangun untuk mengurai kemacetan yang sudah terjadi menahun di Aloha ini," jelasnya.

Untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar proyek Flyover Aloha, pengaturan dilakukan. Gus Muhdlor sudah memerintahkan jajaran terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) untuk turun mengatur kelancaran lalu lintas di titik-titik kemacetan.

"Selama proyek Flyover Aloha berjalan, maka petugas Dinas Perhubungan harus siap-siaga mengatur arus lalu lintas di beberapa titik di ruas jalan Bundaran Aloha. Selain dari dishub, pengaturan lalu lintas



MINTA MAAF - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meminta maaf kepada para pengguna jalan yang melintasi proyek pembangunan Flyover Aloha, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Senin (27/03/2023). c

juga dilakukan dari petugas kepolisian," pintanya. Sementara saat ini, fokusnya mengatur pengaturan arus di

lokasi proyek flyover Aloha. Jajaran Dinas Perhubungan dan kepolisian sudah bekerja maksimal mengatur lalu lintas.

"Ini sekaligus untuk membantu kelancaran arus lalu lintas bagi para pengguna jalan," pungkasnya. (par/wan)

Kebut Pembangunan Proyek Flyover Aloha

Bupati : Maaf Kalau Macet

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan, khususnya yang melewati jalan Aloha Gedangan karena adanya proyek pembangunan flyover Aloha.

Gus Muhdlor memastikan proyek flyover Aloha bakal tuntas pada April 2024 mendatang. Permintaan maaf itu sebelumnya juga sudah disampaikan bupati beberapa waktu yang lalu saat ia meninjau proyek strategis nasional yang bakal mengurai titik kemacetan di Sidoarjo utara tersebut.

Ia juga menegaskan akan terus mengawal proyek flyover Aloha hingga tuntas dan sesuai target yang ditetapkan.

"Saya minta maaf karena ada pengaturan arus lalu lintas akibat pembangunan proyek flyover Aloha, mohon pengertian dan dukungannya masyarakat, insyaAllah proyek selesai tepat waktu yakni April tahun depan," ujar Gus Muhdlor kemarin.

Dalam pantauan Gus Muhdlor sejauh ini proyek berjalan sesuai dengan target. Para pekerja dilhatnya telah bekerja optimal sesuai dengan rencana. Pengaturan arus lalu lintas menurut bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu tidak bisa dihindarkan dan efeknya ada kemacetan.

"Sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah, kami memastikan petugas sudah bekerja keras mengatur arus lalu lintas di sekitar proyek flyover Aloha," tegasnya.

Pembangunan proyek flyover Aloha menurut Gus Muhdlor harus dilakukan sebagai solusi mengatasi kemacetan yang terjadi menahun di jalur Sidoarjo - Surabaya di pintu masuk bandara Internasional Juanda tersebut.

Gus Muhdlor menegaskan pembangunan flyover Aloha nantinya setelah rampung keberadaan flyover Aloha itu akan memper lancar arus lalu lintas dari Sidoarjo menuju Surabaya dan sebaliknya.

"Ben gak tuwek nang dalam, flyover Aloha harus dibangun untuk mengurai kemacetan yang sudah terjadi menahun di Aloha," katanya.

Untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar proyek flyover Aloha, pengaturan dilakukan. Bupati Gus Muhdlor sudah memerintahkan jajaran terkait seperti Dinas Perhubungan untuk turun mengatur kelancaran lalu lintas.

Ia juga memastikan selama proyek flyover Aloha berjalan petugas dari Dinas Perhubungan siap siaga mengatur arus lalu lintas di beberapa titik di ruas jalan bundaran Aloha. Selain



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat sidak proyek flyover Aloha.

dari dishub, pengaturan lalu lintas juga dilakukan dari petugas kepolisian.

"Sekarang fokusnya mengatur pengaturan arus di lokasi proyek flyover Aloha. Jajaran dari Dinas Perhubungan dan polisi sudah bekerja maksimal mengatur lalu lintas sekaligus untuk membantu

kelancaran pengguna jalan," pungkaskannya.

Beberapa pengendara yang lewat salah satunya Herman (45) pengendara yang kerap melewati Aloha mengatakan, mboten nopo nopo mas, perjalanan dialihkan, yang penting besok besok lancar mboten wonten macet, aben injing

kalean sonten (tidak apa apa macet / dialihkan, yang penting besok besoknya tidak ada lagi macet di pagi dan sore hari), ungkap beberapa pengendara.

Perlu diketahui proyek flyover Aloha mulai dikerjakan pada Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada April 2024. • Loe

Dukung Program Ketahanan Pangan, TP PKK Sidoarjo Minta Pemanfaatan Lahan Pekarangan Keluarga



TELATEN: Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Muhdlor saat sosialisasi di kantor Kecamatan Gedangan.

GEDANGAN-TP PKK Sidoarjo melihat pentingnya ketahanan keluarga di masa ini. Hal tersebut bercermin dari kondisi pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi bahan pangannya sendiri.

Mengantisipasi hal seperti itu, TP PKK Sidoarjo menggelar sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga. Diharapkan lewat sosialisasi tersebut anggotanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Acara sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Gedangan tersebut dibuka langsung Ketua

TP PKK Sidoarjo Sa'adah Muhdlor, Selasa, (28/3).

Kegiatan itu dihadiri Camat Gedangan serta perwakilan TP PKK desa se-Kecamatan Gedangan. Dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo.

Kegiatan yang digagas oleh Pokja 3 TP PKK Sidoarjo itu bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah. Lahan kosong tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman sebagai sumber bahan pangan keluarga.

● Ke Halaman 10

Dukung Program Ketahanan...

Beberapa metode penanaman yang dapat dipraktikkan adalah *verti culture*, *wall garden*, serta *aquaphonic* seperti yang sudah dipraktikkan oleh Puskesmas Tulangan.

Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan, acara ini didasari oleh program ketahanan pangan desa. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Diharapkan kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah dan meningkatkan kemandirian pangan keluarga di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.

Dalam sosialisasi kali ini juga diisi dengan praktik menanam langsung di lahan kosong yang ada di sekitar kantor Kecamatan Gedangan. (nis/vga)

LKPD Unaudited Tahun 2022 Diserahkan ke BPK Gus Muhdlor Berharap Sidoarjo Pertahankan WTP

Sidoarjo, Memo X

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Senin (27/03/2023). Penyerahan LKPD ini serentak bersama 38 pemerintah daerah di Jawa Timur. Terkecuali Kota Madiun, yang telah menyerahkannya di bulan Januari 2023 lalu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menyerahkan langsung LKPD Unaudited 2022 Provinsi Jawa Timur. Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, capain itu akan menjadi yang ke 10 kali berturut-turut diraih Pemkab Sidoarjo sejak LKPD Tahun 2013 lalu. Selain itu, Bupati Sidoarjo bersyukur jika Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP itu.

"Capaian itu, menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini bukti Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan



SERAHKAN - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyerahkan LKPD unau-dited Tahun 2022 ke Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi di kantor BPK Perwakilan Jatim, Senin (27/03/2023).

laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Gus Muhdlor.

Menurut Gus Muhdlor capaian opini WTP penting dipertahankan. Alasannya, karena hal itu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, kata Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi.

"Untuk itu, saya akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Kerja keras seluruh ASN Sidoarjo saya harap dapat terus dipertahankan. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas

pengelolaan uang negara, opini WTP menjadi bukti APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah beserta jajaran atas kerja kerasnya. Sehingga dapat menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited secara tepat waktu sesuai amanat Undang - Undang. Menurutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 menyatakan gubernur/bupati/wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Laporan keuangan selanjutnya, akan diperiksa BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan empat aspek. Yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)," paparnya.

Bagi Karyadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampirkan dengan laporan keuangan perusahaan daerah (BUMD).

"Ini diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, LKPD juga dilampiri dengan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yang di dalamnya termasuk realisasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (par/wan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PENGGUNA JALAN TERGANGGU PROYEK FLYOVER ALOHA, BUPATI MOHON MAAF

Sidoarjo, Pojok Kiri

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan yang melewati jalan Aloha Gedangan karena adanya proyek pembangunan flyover Aloha.

Gus Muhdlor memastikan proyek flyover Aloha bakal tuntas pada April 2024 mendatang. Permintaan maaf itu sebelumnya juga sudah disampaikan bupati beberapa waktu yang lalu saat ia meninjau proyek strategis nasional yang bakal mengurai titik kemacetan di Sidoarjo utara tersebut.

Ia juga menegaskan akan terus mengawal proyek flyover Aloha hingga tuntas dan selesai sesuai target yang ditetapkan.

"Saya minta maaf karena ada pengaturan arus lalu lintas akibat pembangunan proyek flyover Aloha, mohon pengertian dan dukungannya masyarakat, insyaAllah proyek selesai tepat waktu yakni April tahun depan," ujar Gus Muhdlor. Senin, (27/3/2024).

Dalam pantauan Gus Muhdlor sejauh ini proyek

berjalan sesuai dengan target. Para pekerja dilihatnya telah bekerja optimal sesuai dengan rencana. Pengaturan arus lalu lintas menurut bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu tidak bisa dihindarkan dan efeknya ada kemacetan.

"Sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah, kami memastikan petugas sudah bekerja keras mengatur arus lalu lintas di sekitar proyek flyover Aloha," tegasnya.

Pembangunan proyek flyover Aloha menurut Gus Muhdlor harus dilakukan sebagai solusi mengatasi kemacetan yang terjadi menahun di jalur Sidoarjo – Surabaya di pintu masuk bandara Internasional Juanda tersebut.

Proyek flyover Aloha mulai dikerjakan pada Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada April 2024. Gus Muhdlor menegaskan pembangunan flyover Aloha nantinya setelah rampung keberadaan flyover Aloha itu akan memperlancar arus lalu lintas dari Sidoarjo menuju Surabaya dan sebaliknya.



Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor saat Sidak Proyek Flyover Aloha

"Ben gak tuwek nang dalan, flyover Aloha harus dibangun untuk mengurai kemacetan yang sudah terjadi menahun di Aloha," katanya.

Untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar proyek flyover Aloha, pengaturan dilakukan. Bupati Gus Muhdlor sudah memerintahkan ja-

jaran terkait seperti Dinas Perhubungan untuk turun mengatur kelancaran lalu lintas.

Ia juga memastikan selama proyek flyover Aloha berjalan petugas dari Dinas Perhubungan siap siaga mengatur arus lalu lintas di beberapa titik di ruas jalan bundaran Aloha. Selain dari dishub, pengaturan lalu

lintas juga dilakukan dari petugas kepolisian.

"Sekarang fokusnya mengatur pengaturan arus di lokasi proyek flyover Aloha. Jajaran dari Dinas Perhubungan dan polisi sudah bekerja maksimal mengatur lalulintas sekaligus untuk membantu kelancaran pengguna jalan." pungkasnya. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Manfaatkan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan



Kami ingin lahan kosong yang ada dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman sebagai sumber bahan pangan keluarga. Bisa dengan vertikultura, *wall garden*, akuaponik, dan lainnya. Hari ini (kemarin, Red) kami latih masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut. Diharapkan, masyarakat bisa mandiri memenuhi kebutuhan pangan keluarga."

SA'ADAH AHMAD MUHDLOR

*Ketua TP PKK Kabupaten
Sidoarjo saat sosialisasi
pemanfaatan lahan pekarangan
keluarga di kantor Kecamatan
Gedangan kemarin*

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pencairan TPP ASN Sidoarjo Belum Ada Titik Terang

Sidoarjo, Bhirawa

ASN di Pemkab Sidoarjo sempat bertanya-tanya, kenapa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk mereka, pada Januari-Maret 2023 belum mereka terima.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, Jaka Sami aji SE MM, menjelaskan pihaknya siap saja untuk mencairkan TPP tersebut.

Namun, untuk pencairan tersebut masih ada dokumen penting sebagai pelengkap, dari semua OPD di Pemkab Sidoarjo, yang masih belum disertakan. Yakni terkait SK kepegawaian di masing-masing OPD.

“Kasda siap membayar TPP ini. Tapi SK kepegawaian, sebagai syarat pelengkap dokumen TPP ini dari OPD, masih belum ada. Dengan SK itu, nanti pen-



alikusvanto/bhirawa

✓ Pencairan TPP ASN Sidoarjo Belum Ada Titik Terang

● Sambungan hal 1

cairan TPP akan bisa tepat. Si A dapat berapa dan si B dapat berapa,” paparnya, ditemui Selasa (28/3).

Disampaikan Jaka, pemberian TPP ini tidak boleh asal-asalan. Tetapi harus sesuai dengan kaidah jabatan yang disandang ASN. Maka itu, pencairan TPP sebelum ditetapkan dalam suatu SK Bupati, prosedurnya terlebih dulu harus dievaluasi oleh pihak Kemendagri.

“Begitu ada SK Bupatinya. Segera kita cairkan. Sehingga bisa segera dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ASN Sidoarjo,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Jaka Samiaji ini, sama dengan yang disampaikan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M Ainur Rahman AP MSi.

Pada tahun 2022 lalu, TPP ASN Sidoarjo juga sempat terlambat cair. Menurut Ainur, karena ada mekanisme dari Pusat, yakni rekomendasi dari Kementerian Keuangan, yang memastikan TPP supaya betul-betul sesuai dengan nilai jabatan ASN masing-masing.

Hasil rekomendasi, menurutnya memang agak lama. Sebab yang dievaluasi tidak hanya dari Kab Sidoarjo saja. Tetapi seluruh Kab/Kota se Indonesia. Dirinya mengimbau, meski saat ini TPP masih belum cair, tapi para ASN di Pemkab Sidoarjo harus tetap berdedikasi dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya. [kus.iib]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tambah Layanan Adminduk Terintegrasi di Enam Instansi Kesehatan



Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma saat menjalin kerja sama dengan beberapa instansi kesehatan.

KOTA-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo kembali menambah layanan adminduk terintegrasi, Selasa (28/3). Hal tersebut setelah Dispendukcapil menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit (RS), puskesmas hingga klinik.

Kapala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, sedikitnya ada enam instansi yang berkerjasama terkait dengan layanan tersebut. Empat di antaranya merupakan RS swasta. Sementara sisanya merupakan puskesmas dan klinik.

Keempat RS swasta itu adalah RSU Jasem, RS Delta Surya, RS 'Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan dan RS PHC Surabaya.

Sedangkan sisanya adalah Puskesmas Wonoayu dan klinik di Sukodono. "Tadi pagi (kemarin, Red) rapat koordinasi sekaligus penandatanganannya," ujar Reddy.

Pelayanan adminduk terintegrasi tersebut meliputi pelayanan akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan kartu identitas anak (KIA). Nantinya, masyarakat Sidoarjo yang melahirkan di enam instansi itu akan memperoleh tiga dokumen kependudukan tersebut.

Reddy mengatakan, untuk mendapatkan layanan itu, pasien yang akan melahirkan cukup membawa KK, buku nikah dan fotocopy KTP saksi atau keluarga. "Yang terpenting lagi, nama anak

juga sudah disiapkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Dispendukcapil Sidoarjo sudah menjalin kerja sama dengan 18 instansi sejak awal 2023. Sebanyak 11 di antaranya dengan RS swasta. Sehingga totalnya saat ini menjadi 15 RS swasta yang sudah bekerja sama dengan Dispendukcapil.

"Tapi kalau ditambah klinik dan puskesmas menjadi 17 instansi kesehatan," bebernya.

Sementara itu tahun lalu, Dispendukcapil Sidoarjo menjalin kerja sama dengan 23 instansi terkait layanan adminduk terintegrasi. "Ada tujuh RS dan dua puskesmas. Sisanya di luar instansi kesehatan," bebernya. (far/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KEPENDUDUKAN

Lahir di Surabaya, Langsung Dapat Akta Sidoarjo

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo kemarin (28/3) menambah kerja sama penerbitan administrasi kependudukan (adminduk) dengan 4 rumah sakit swasta, 1 puskesmas, dan 1 klinik. Bayi lahir di fasilitas kesehatan tersebut bisa langsung mendapat akta kelahiran. Bahkan saat mereka lahir di Surabaya.

Pada Januari lalu, Dispendukcapil Sidoarjo sudah bekerja sama dengan 11 rumah sakit swasta di Sidoarjo. Kerja sama tersebut berupa penerbitan adminduk. Di antaranya, paket akta kelahiran dan akta kematian bagi bayi maupun ibu yang baru melahirkan, kartu keluarga (KK), hingga penerbitan kartu identitas anak (KIA).

Dispendukcapil Sidoarjo melatih petugas rumah sakit untuk membantu pasien memproses layanan adminduk. Petugas diberi *password* untuk mengakses *website plavondukcapil* dan menguruskan dokumennya. "Bayi lahir di sana, pulang sudah punya akta. Hari ini (kemarin, Red) kami menambah layanan tersebut ke enam instansi," kata Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma kemarin. Yakni, RSUD Jasem, RS Delta Surya, RS Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan, RS Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya, Puskesmas Wonoayu, dan klinik Sukodono.

Menariknya, salah satu RS, yakni RS PHC, berada di Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya. Artinya, warga Sidoarjo yang melahirkan di Surabaya tetap bisa mendapat pelayanan di sana dan mendapatkan KK maupun akta Sidoarjo. "Ini khusus pasien dengan KK atau KTP Sidoarjo yang melahirkan di RS Surabaya tersebut," jelas Reddy. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

TP PKK Sidoarjo Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Keluarga



SP/HIKMAH

Acara sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Gedangan.

SURABAYAPAGI, Sidoarjo - TP PKK Kabupaten Sidoarjo melihat pentingnya ketahanan keluarga di masa ini. Hal tersebut bercermin dari kondisi pandemi Covid19 beberapa tahun lalu. Banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi bahan pangannya sendiri. Mengantisipasi hal tersebut, TP-PKK Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga. Di harapkan lewat sosialisasi tersebut anggotanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Acara sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan keluarga yang

dilaksanakan di kantor Kecamatan Gedangan tersebut dibuka langsung Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sa'adah Muhdlor S. Hum, Selasa, (28/3). Kegiatan yang dihadiri Camat Gedangan serta perwakilan TP PKK desa Se-Kecamatan Gedangan. Dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan yang digagas oleh Pokja 3 TP-PKK Sidoarjo itu bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong yang

ada di pekarangan rumah. Lahan kosong tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman sebagai sumber bahan pangan keluarga. Beberapa metode penanaman yang dapat dipraktekkan adalah vertikultur, wall garden, serta aquaphonic seperti yang sudah dipraktekkan oleh Puskesmas Tulangan.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan acara ini didasari oleh program ketahanan pangan desa. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ia ingat tentang kondisi beberapa tahun lalu ketika pandemi Covid19 melanda. Banyak warga yang kekurangan bahan pangan. Hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya program ketahanan pangan secara mandiri dimasa sekarang.

"Diharapkan kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah dan meningkatkan kemandirian pangan keluarga di wilayah Kabupaten Sidoarjo,"ucapnya.

Dalam sosialisasi kali ini juga diisi dengan praktek menanam langsung di lahan kosong yang ada di sekitar kantor Kecamatan Gedangan. ■ Hik



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Interes Restorative Justice KDRT, Orang Pintar Sulit Berdamai

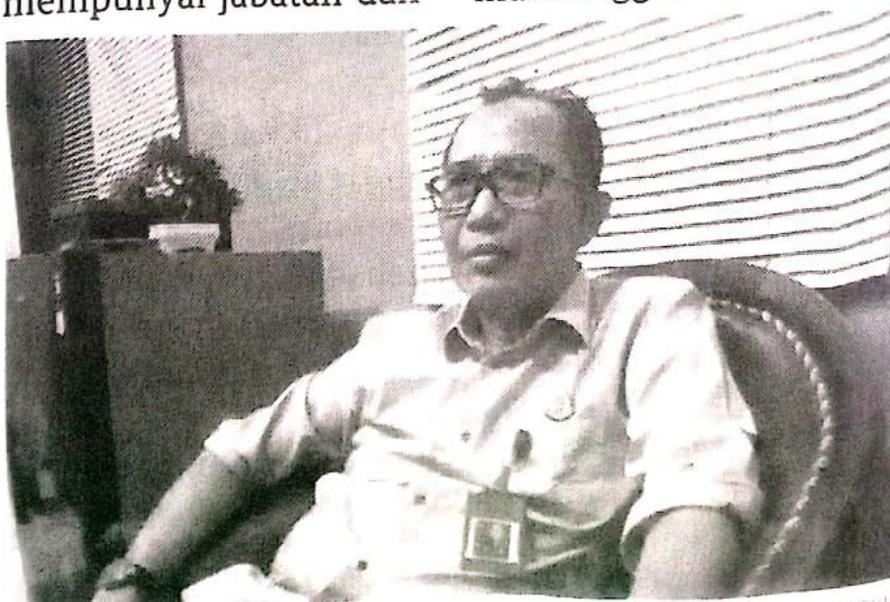
SIDOARJO - Perceraian suami istri dalam rumah tangga berbagai macam penyebabnya. Karena perselingkuhan dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam penyelesaian KDRT Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) tertarik dalam menyelesaikan pada Restorative Justice.

Mengemban jabatan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Hafidi kerap menyelesaikan KDRT tidak sampai diajukan penuntutan ke persidangan. KDRT diselesaikan pada keadilan Restorative Justice. Dari perkara KDRT yang paling sulit didamaikan adalah orang-orang pintar yang mempunyai jabatan dan

tercatat sebagai pegawai ASN atau TNI/Polri dan sebagainya.

“Malah justru yang paling gampang didamaikan adalah orang-orang yang berprofesi biasa. Seperti buruh pabrik, sopir dan sebagainya. Mereka rata-rata mau rujuk kembali. Dan perkaranya tidak di sidangkan,” tegas Hafidi Kasi Pidum Kejari Sidoarjo, Selasa (28/3).

Restorative Justice perkara KDRT, melanggar Pasal 44 ayat (1) UURU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketika rumah tangga pecah berantakan, hingga terjadi perceraian sakit luar biasa dihati. Semoga tetap sabar untuk suami istri dalam rumah tangga. ● dar



DUTA

Siswa Smamda Dilatih Merawat Jenazah

Sidoarjo - **HARIAN BANGSA**
Ratusan siswa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo dilatih merawat jenazah saat mengikuti kegiatan Baitul Arqom, di gedung sekolah setempat, Jl Mojopahit Sidoarjo, Selasa (28/3).

Saat praktik merawat jenazah ini, siswa kelas X itu dibagi per kelompok. Para siswa Smamda pun praktik merawat jenazah dengan bimbingan seorang guru pembimbing. Mulai dari tahap cara memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga cara menguburkan jenazah.

Kepala Smamda Sidoarjo M Zainul Arifin menjelaskan, melalui kegiatan Baitul Arqom, pihaknya melakukan peng-

kaderan kepada siswa kelas X Smamda agar mengetahui tentang Al Islam dan Kemuhammadiyah. "Dan salah satunya mengaplikasikan siswa bisa merawat jenazah," cetusnya.

Sehingga dengan memiliki keterampilan tersebut, kata Zainul, pada saat ada keluarganya yang meninggal, siswa bersangkutan tidak lagi kesulitan untuk ikut merawat jenazah keluarganya tersebut.

Ditambahkan Zainul, selain keluarganya, siswa Smamda nantinya juga diharapkan bisa ikut membantu merawat jenazah di masyarakat. "Di Baitul Arqom ini, siswa juga berlatih gerakan salat yang sesuai dengan sunnah rasul," tandasnya.

Salah satu guru pembimb-



Siswa Smamda praktik merawat jenazah saat mengikuti Baitul Arqom, Selasa (28/3).

ing, Nur Hasan Basri menambahkan, melalui pelatihan ini, siswa diharapkan tidak canggung dan berani ikut merawat jenazah saat orang tuanya maupun saudaranya meninggal dunia.

"Ketrampilan merawat jenazah ini penting bagi siswa," tandas guru pelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah ini.

Salah satu siswa Smamda, Albin Putera Pramuditya mengatakan, praktik merawat jenazah ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan teman-temannya. "Jika ada keluarga maupun kerabat yang meninggal, saya tidak kaget lagi dan bisa ikut merawat jenazah," ungkap siswa kelas X-7 ini. (sta/rd)



Mahasiswa program Kampus Mengajar dari Unesa saat berfoto bersama dengan para guru di SDN Damarsi Buduran.

Program Kampus Mengajar Unesa Sasar SDN Damarsi Buduran

Sidoarjo, Bhirawa

Program Kampus Mengajar dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menysasar ke SD Negeri Damarsi Buduran Sidoarjo. Kepala SDN Damarsi Buduran Sidoarjo Ali Sadikin, S.Pd menyambut baik program kampus mengajar dari mahasiswa merdeka belajar angkatan V Universitas Negeri Surabaya tersebut.

Menurut Ali Sadikin, kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama satu semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

"Caranya dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan," jelas Ali Sadikian.

Lebih lanjut menurut Ali Sadikian, SDN Damarsi Buduran Sidoarjo adalah yang menjadi subjek atau sasaran berkolaborasi kampus mengajar dari mahasiswa merdeka belajar.

Setelah disetujui, pihak Dinas Kabupaten Sidoarjo keempat mahasiswa Unesa yakni Chelsea Aura Brilliants, Rachmad Dwi Afandi Arif, Irfiana Salsabilan dan Mirza Nuria Chusnah merealisasikan kolaborasi dengan SDN Damarsi Buduran dimulai bulan 01 Maret 2023 s/d 30 Juni 2023 mendatang.

Dwi Afandi salah satu mahasiswa yang lulus dari seleksi mahasiswa merdeka belajar menceritakan tahapan untuk menjadi mahasiswa merdeka belajar wajib mengikuti seleksi yang diadakan oleh kemendikbud dari beberapa tahapan. Tahapan terakhir adalah pengumuman.

"Kemendikbud pusat dan dispendik kabupaten akan memonitor kegiatan ini" jelas Dwi Affandi. [ach.why]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SMKN 2 Buduran Perkuat Karakter dengan Membaca Al-Qur'an

Sidoarjo, Bhirawa

Dalam menguatkan karakter guru dan siswa-siswanya, SMK Negeri 2 Buduran melakukan gerakan membaca Al Quran, bahkan hingga mencapai tahfidz. Aktivitas ini sebenarnya sudah rutin dilakukan, namun di bulan Ramadhan 1444 H ini lebih digiatkan lagi.

Pernyataan itu disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo Dra. Hj Mariya Ernawati, MM usai menyemangati gerakan membaca Al Quran di sekolahnya, pada (28/3) kemarin.

Ia katakan, membaca Al-Qur'an di sekolah merupakan upaya memperkuat kemampuan literasi peserta didik muslim dalam membaca dan memahami Al Quran. "Kegiatan keagamaan rutinitas terjadwal tidak hanya dalam intrakurikuler tapi juga ekstrakurikuler. Bukan sekedar baca usai jam sekolah, namun hingga lanjut kelas tahfidz," tegasnya.

Menurutnya, berbagai kegiatan

keagamaan selain baca Al Quran juga ada Istighotsah setiap Jumat serta ekstrakurikuler Tilawah. Al Banjari.

Kerohanian Islam.

"Dalam bulan Ramadhan 1444 H ini juga ada buku laporan kegiatan mu-

lai sahur sampai dengan tarowih, bentuknya file/tabel/buku ramadhan dan juga bentuk video," katanya.

Ia berharap, literasi ini bisa membentuk karakter yang kokoh, kuat sehingga terbentuk pribadi yang beriman/bertaqwa yang masuk dimensi pertama Profil Pelajar Pancasila. Tidak ketinggalan juga bapak/ibu guru karyawan juga ada program khotmil Quran.

"Semoga bisa saling memotivasi dalam kebaikan dan menggelorakan akhlak mulia di segala aspek kehidupan," harap Mariya Ernawati.

Lanjutnya, begitu juga untuk kegiatan Pondok Ramadhan 1444 H ini juga dijadwal mulai pagi hingga sholat tarowih serta tadarus Al Quran, semoga tidak hanya memahami tapi juga kita aplikasikan maknanya dalam kehidupan sehari-hari "Kami juga beri reward untuk 10 peserta terbaik per tingkat, semoga termotivasi untuk terus belajar menuju kebaikan, aamiin," kata Mariya berharap. [ach.why]



ahmad suprayogi/bhirawa

Para guru dan siswa sedang membaca Al-Qur'an bersama-sama.

HARIAN
Bhirawa

Warta Digital Sidoarjo

Batas Desa Karangbong Ditanyakan Warga



Batas Desa Karangbong yang ditanyakan warga.

SURABAYAPAGI, Sidoarjo - Warga Desa Karangbong RT 03/RW 01 Kecamatan Gedangan mempertanyakan batas desanya yang bersebelahan dengan Desa Tebel tempat berdirinya Pabrik Bernofarm.

Keresahan ini bermula saat sebidang tanah milik Miskan almarhum warga Karangbong tepat di samping tembok pabrik Bernofarm dibeli oleh pabrik yang memproduksi obat-obatan ini, serta merta berencana memindah saluran air.

"Namun dalam perjalanannya pihak pabrik Bernofarm berkeinginan untuk memindah saluran air yang sebelumnya saluran umum milik warga ke lahan sebelah tanah warga sebab merasa tanah yang ada saluran airnya sudah dibelinya," ujar salah satu

warga yang tak mau disebut namanya, Selasa (28/3). Firman, salah satu ahli waris yang tanahnya kini sudah terbeli oleh pabrik, membenarkan tentang terjadinya jual beli tersebut, namun terkait saluran air pihaknya belum sepenuhnya setuju karena dampaknya.

Terkait batas desa, dari informasi warga yang terhimpun, memang berada di saluran air yang rencananya akan di pindah tersebut. Yang jadi pertanyaan warga bila saluran air tersebut bakal dipindah berarti batas desa juga ikut pindah.

Untuk menelusuri kebenaran batas wilayah Desa Karangbong di RT 03/RW 01 ini, Kades Karangbong Bambang Asmuni saat dihubungi mengatakan bahwa batas desa masuk dalam wilayah tembok Pabrik Bernofarm.

Sementara itu Pemkab Sidoarjo, melalui Asmara Hadi Administrasi Pemerintahan mengatakan, Perbup bupati jadi cantolan terkait batas desa ini.

Sebab fungsinya sangat vital, diantaranya untuk pelayanan di bidang administrasi kependudukan, pelayanan di bidang politik untuk penetapan hak suara, pelayanan di bidang perpajakan, maupun pelayanan di bidang pertanahan untuk program PTSL atau pendaftaran tanah sistem lengkap dari pihak BPN.

"Dasar hukum dari program penetapan Perbup batas desa ini adalah Permendagri tahun 2006," jelasnya

Di Kab Sidoarjo untuk penetapan batas desa ini, selain menggunakan batas kretek desa atau kondisi geografis alam desa/kelurahan yang bersangkutan, menurut Hadi, juga disempurnakan dengan memanfaatkan pemetaan GPS atau pemetaan geografis sistem koordinat satelit.

"Dengan pemetaan GPS, sepanjang waktu batas desa tidak bisa hilang. Namun geografis alam bisa hilang karena keadaan zaman yang berubah," ujarnya.

■Hdk/hik

Tahun Ini Kemenag Berangkatkan 2.596 Jamaah Haji

KOTA-Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo tahun ini mendapatkan kuota haji sebanyak 2.596 jamaah. Angka tersebut meningkat dari estimasi sebelumnya yang hanya sebanyak 2.376 jamaah.

Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo Arwani mengatakan, kuota yang didapat tersebut terdiri dari jamaah yang sudah melunasi pembayaran haji 2020 namun

keberangkatannya ditunda. Kemudian jamaah sesuai dengan nomor urut porsi tahun ini dan calon jamaah haji lanjut usia. "Termasuk jamaah haji cadangan sebanyak 262 orang," katanya.

Pihaknya sudah mulai melakukan pemberitahuan kepada calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Mulai dari pemberitahuan lewat surat, telepon, hingga datang langsung ke alamatnya.

Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan presiden (Keppres). Di dalamnya nanti akan mengatur jadwal pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta besaran pelunasannya. Sebab diperkirakan tahun ini ada peningkatan BPIH.

Meski begitu, sejumlah persiapan pemberangkatan calon jamaah haji terus dilakukan. Seperti

melengkapi berkas administrasi. Mulai dari penerbitan visa ataupun paspor.

Hingga saat ini sudah ada 500 jamaah yang mengurus paspor secara kolektif. Selain itu juga ada 1.200 paspor jamaah haji tunda yang masih berlaku. Dia mengimbau, jamaah yang merasa kesulitan terkait berkas apa saja yang harus dilengkapi bisa

● Ke Halaman 10

 RADAR
SIDOARJO.ID

Tahun Ini Berangkatkan...

datang ke kantor Kemenag Sidoarjo untuk dibantu. Dia berharap seluruh calon jamaah haji untuk bisa melengkap

 RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hapus Calistung sebagai Syarat Masuk SD

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim merevolusi sejumlah hal terkait sistem pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Itu tertuang pada Merdeka Belajar Episode 24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang diluncurkan kemarin (28/3).

Salah satunya, menghilangkan tes baca, tulis, dan berhitung (calistung) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD/MI/ sederajat. Menurut Nadiem, hingga saat ini ada miskonsepsi tentang calistung pada PAUD dan SD/MI/ sederajat kelas awal (kelas I dan II). Hal itu berakibat pembangunan kemampuan pada anak PAUD masih sangat berfokus pada calistung. Apalagi, calistung diterapkan sebagai syarat PPDB SD/

POIN-POIN MERDEKA BELAJAR EPISODE 24

- Menghilangkan tes baca, tulis, dan berhitung (calistung) dan proses penerimaan peserta didik baru di jenjang sekolah dasar (SD).
- Tidak ada evaluasi kelulusan untuk peserta didik PAUD.
- Kompetensi lulusan untuk PAUD tidak dirancang per usia, melainkan sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase.
- Menerapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama, termasuk untuk orang tua/wali murid Beraku di PAUD maupun SD.
- Tidak ada tuntutan anak kelas I untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung.
- Menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Di antaranya, nilai agama, budi pekerti, hingga kematangan emosi.

Sumber: Kemendikbudristek

MI/ sederajat.

Padahal, kata Nadiem, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. "Kemampuan calistung yang sering dibangun secara instan masih dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar," ujarnya.

Selain itu, tes calistung telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dan, diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. "Masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD. Sangat tidak tepat apabila anak diberi syarat tes calistung untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan dasar," ungkapnya.

Hal lain dalam Merdeka Belajar 24, satuan pendidikan perlu menerapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. Termasuk untuk orang tua/wali murid. Dengan begitu, peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar.

Nadiem mengungkapkan, transisi PAUD ke SD harus berjalan dengan mulus. Proses belajar-mengajar di PAUD dan SD/MI/ sederajat kelas awal harus se-laras dan berkesinambungan. (mia/c7/fal)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Begini Reaksi Politisi PKB Soal Kasus PTSL di Sidokerto dan Sidokepong

Admin 

Tuesday, March 28, 2023, March 28, 2023 WIB



Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori.

DNN, SIDOARJO - Mandegnya layanan PTSL di Desa Sidokepung dan terjadinya permasalahan hukum terkait dugaan pungli penerbitan surat waris dan hibah di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran mendapat atensi dari ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/03/2023) pagi tadi, Dhamroni meminta pada pimpinan BPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait program PTSL tersebut. Hal ini diperlukan agar pemahaman regulasi tentang program ini sejalan dan tidak rancu yang dapat memantik permasalahan di desa.

"Harus disepakati dulu bahwa PTSL ini adalah program yang bagus dari pemerintah pusat. Program ini digulirkan untuk memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam penerbitan sertifikat tanahnya. Selain itu persyaratan administrasinya juga mudah karena disitu banyak diskresi yang diberikan dibandingkan pengurusan rutin," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyayangkan jika ada persoalan di Desa kemudian program PTSL tersebut dihentikan. Menurutnya BPN harusnya melakukan edukasi di Desa yang bermasalah tersebut.

